

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan persoalan global yang sulit dihindari oleh setiap negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini didukung oleh data yang menunjukkan bahwa lebih dari 40 persen penduduk miskin di dunia tinggal di negara-negara berkembang, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi (World Bank, 2016). Setelah munculnya agenda global pasca MDGs yang dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs), kemiskinan juga menjadi tujuan pertama dari tujuh belas tujuan yang disepakati dalam agenda tersebut. Dewi, et al (2017) berpendapat menyelesaikan persoalan kemiskinan dipandang sebagai kunci utama dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan, serta menjadi sasaran strategis dalam perumusan kebijakan pembangunan di banyak negara. Isu kemiskinan tetap menjadi fokus prioritas dalam agenda pembangunan berkelanjutan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan mendasar di Indonesia. Damanik & Sidauruk (2020), menyatakan bahwa permasalahan kemiskinan di Indonesia berkaitan dengan jumlah penduduk yang tinggi. Jumlah penduduk yang tinggi apabila tidak diimbangi dengan pemerataan akses terhadap sumber daya dan lapangan pekerjaan dapat memperparah kemiskinan (Damanik & Sidauruk, 2020). Meskipun pemerintah telah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,5%–7,5% melalui RPJMN 2020–2024, kenyataannya hingga tahun 2024, data menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin secara nasional masih mencapai 9,03% atau sekitar 25,22 juta jiwa. Jumlah ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan belum sepenuhnya berhasil, terutama jika dilihat dari persebarannya secara regional. Salah satu kawasan yang masih menyumbang jumlah penduduk miskin cukup besar adalah Pulau Sumatera, yang secara keseluruhan mencatat sekitar 5,6 juta jiwa penduduk miskin, atau sekitar 22,2% dari total nasional. Ini menjadikan Pulau Sumatera sebagai kawasan dengan beban kemiskinan terbesar di luar Jawa.

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2019 dan 2023 (Jiwa)

Provinsi	Tahun		Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2019	2023	
Aceh	890 760	806 750	-2.45
Sumut	1 260 500	1 239 710	-0.41
Sumbar	343 090	340 370	-0.20
Riau	483 920	485 660	0.09
Jambi	273 370	280 680	0.66
Sumsel	1 067 160	1 045 680	-0.51
Bengkulu	298 000	288 460	-0.81
Lampung	1 041 480	970 670	-1.74
Bangka Belitung	67 370	68 690	0.49
Kepri	127 760	142 500	2.77

Sumber: Badan Pusat Statistik, (2024), diolah

Di antara seluruh provinsi di Pulau Sumatera, Sumatera Utara mencatat jumlah penduduk miskin terbanyak secara absolut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025), jumlah penduduk miskin di provinsi ini mencapai 1,24 juta jiwa pada tahun 2023, tertinggi dibandingkan 10 provinsi lainnya di Sumatera. Sebelumnya, Fadriyani & Purnomo (2022) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin sempat meningkat dari 1,28 juta jiwa pada tahun 2020 menjadi 1,34 juta jiwa pada tahun 2021 akibat ketimpangan akses terhadap sumber daya dan diperburuk oleh pandemi COVID-19 (Saputra et al., 2024). Namun, seiring meredanya dampak pandemi, jumlah tersebut mulai menunjukkan penurunan pada tahun 2022 dan 2023. Penurunan kemiskinan di Sumatera utara cukup tinggi dari tahun 2019 sebanyak 21 ribu orang dengan rata-rata penurunan sebesar 0,41%. Meskipun demikian capaian ini masih tertinggal dari provinsi lain yang ada di pulau sumatera dengan penurunan yang lebih cepat seperti Lampung dan Aceh. Kondisi ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pengentasan kemiskinan namun efektivitas strateginya masih perlu ditingkatkan karena Sumatera Utara tetap menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Pulau Sumatera.

Meskipun apabila dilihat dari tingkat persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 tercatat sebesar 8,15%, yang berarti lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 9,36%. Namun, upaya pengentasan kemiskinan di Sumatera Utara belum merata di seluruh wilayah. Hal ini terlihat dari masih tingginya angka kemiskinan di beberapa kabupaten dan kota, terutama di daerah-daerah terpencil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), terdapat kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin yang sangat tinggi, seperti Nias Barat (22,81%), Nias Utara (21,79%), Gunungsitoli (14,78%), dan Tapanuli Tengah (12,21%). Sebaliknya, beberapa wilayah lain menunjukkan angka kemiskinan yang relatif rendah, seperti Kabupaten Deli Serdang (3,44%), Kota Binjai (4,79%), dan Kota Padang Sidempuan (6,85%).

Perbedaan tingkat kemiskinan yang mencolok antara daerah di Sumatera Utara seperti perkotaan dan pedesaan juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengentasan kemiskinan. Wilayah pedesaan, khususnya di daerah terpencil seperti Nias, masih menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi. Oleh karena itu, upaya pengurangan kemiskinan harus melibatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, yang memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi dan dapat membantu menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan (Fisabilillah, 2022).

Sebagai provinsi yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan, Sumatera Utara menempatkan pengentasan kemiskinan berbasis partisipasi perempuan sebagai salah satu fokus utama pembangunan daerah. Hal ini diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan perempuan, yang secara resmi menjadi bagian dari 17 program prioritas Sumatera utara yang terdapat dalam rancangan awal RPJMD Sumatera Utara 2025-2029. Langkah ini merupakan bentuk kesadaran pemerintah atas peran perempuan dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan.

Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja menjadi indikator penting dalam menganalisis keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi produktif. Partisipasi angkatan kerja perempuan yang tinggi menunjukkan bahwa perempuan berperan dalam mendorong penurunan kemiskinan. Peningkatan keterlibatan perempuan yang bekerja berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan, hal ini didukung oleh Kurniasih et al. (2022) yang menyatakan bahwa partisipasi

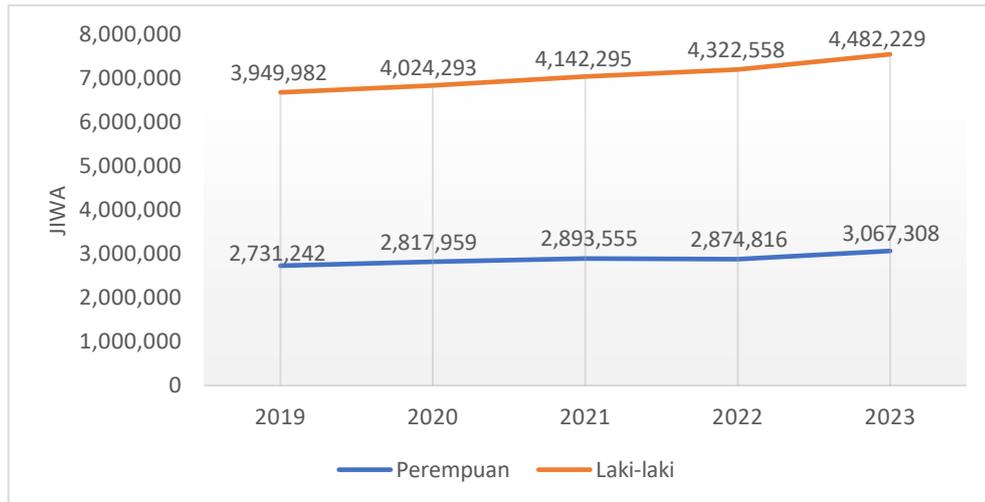
perempuan dalam pasar kerja dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, sehingga dapat keluar dari kemiskinan di Provinsi Riau. Partisipasi angkatan kerja perempuan berperan penting dalam mengurangi kemiskinan. Penelitian Sari & Artha (2025) menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi perempuan secara signifikan menurunkan kemiskinan rumah tangga di Indonesia.



Gambar 1.1 Perempuan Bekerja dan Perempuan tidak Bekerja di Sumatera Utara 2019-2023 (Jiwa)

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2023)

Berdasarkan gambar 1.1 di atas, jumlah angkatan kerja perempuan di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren yang meningkat selama beberapa tahun terakhir. Data dari tahun 2019 hingga 2023 memperlihatkan bahwa jumlah perempuan yang termasuk dalam angkatan kerja mengalami pertumbuhan sebesar 3,14% per tahun. Pada tahun 2019, angkatan kerja perempuan terdiri dari 2.731.242 jiwa dan meningkat menjadi 3.067.308 jiwa pada tahun 2023. Peningkatan Partisipasi aktif Perempuan dapat berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan (Atiah & Najib, 2024) dan mendukung pembangunan sosial secara lebih luas (Kabeer, 2005). Oleh karena itu, peningkatan angkatan kerja perempuan bisa jadi salah satu kunci dalam upaya pengentasan kemiskinan di Sumatera Utara. Angkatan kerja perempuan merupakan bagian dari penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi atau yang bekerja dan yang tidak bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan (pengangguran).



Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin di Sumatera Utara (Jiwa)

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2024)

Berdasarkan Gambar 1.2, jumlah perempuan yang bekerja menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022. Meskipun secara umum pertumbuhan jumlah perempuan yang bekerja bersifat positif, namun jumlahnya masih tetap lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini mencerminkan masih adanya kesenjangan partisipasi tenaga kerja berdasarkan gender yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan akses perempuan terhadap kesempatan kerja ataupun beban ganda antara pekerjaan dan tanggung jawab domestik yang dialami oleh perempuan.

Disisi lain, meskipun jumlah perempuan yang bekerja dalam angkatan kerja mengalami pertumbuhan yang positif, tidak dapat diabaikan bahwa sebagian dari angkatan kerja perempuan masih berada dalam kondisi menganggur. Hal ini terlihat dari data Badan Pusat Statistik (2025), bahwa jumlah perempuan menganggur di Provinsi Sumatera Utara yang mengalami fluktuasi selama periode 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, jumlah Perempuan menganggur tercatat sebesar 160.656 jiwa dan meningkat signifikan menjadi 207.260 jiwa pada tahun 2023. Tingginya jumlah perempuan menganggur di beberapa kabupaten/kota menunjukkan masih adanya hambatan bagi perempuan dalam mengakses pekerjaan. Pengangguran perempuan berdampak pada meningkatnya risiko kemiskinan, terutama karena berkurangnya pendapatan keluarga dan terbatasnya akses perempuan terhadap pekerjaan yang layak sehingga meningkatkan risiko kemiskinan (Azzahra, 2024).

Novianti (2019) menyatakan bahwa pengangguran perempuan yang meningkat mencerminkan ketidakefisienan pasar tenaga kerja dan hambatan dalam akses pekerjaan.

Fenomena ini menegaskan pentingnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai indikator yang mencerminkan sejauh mana perempuan menikmati hasil pembangunan secara setara dengan laki-laki, khususnya dalam bidang ekonomi dan ketenagakerjaan. IPG memberikan penilaian mengenai kesetaraan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, sehingga relevan digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara ketimpangan gender dan kemiskinan. Suparman (2021), menegaskan bahwa rendahnya IPG yang disertai tingginya angka kemiskinan disebabkan karena perempuan masih menghadapi tantangan besar dalam berkontribusi di dunia kerja dan ekonomi.

Oleh karena itu, pemilihan variabel dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan lapangan kerja, tetapi juga dengan siapa yang memiliki akses terhadap pekerjaan dan pembangunan. Oleh karena itu, variabel yang digunakan mewakili dimensi partisipasi, hambatan dan kesetaraan gender, khususnya perempuan, yang selama ini kerap menjadi kelompok yang lebih rentan terhadap kemiskinan.

Studi tentang kemiskinan sudah banyak dilakukan, namun spesifik menganalisis peran perempuan atau mengangkat isu gender dalam mengentaskan kemiskinan di Sumatera utara masih terbatas. Meskipun beberapa penelitian, seperti yang dilakukan Susilo et al. (2024), Kurniasih et al. (2022) dan Nafisah (2024), melakukan analisis mengenai hubungan antara ketenagakerjaan perempuan dan kemiskinan di Indonesia, namun sebagian besar penelitian tersebut terbatas pada provinsi tertentu seperti Bali dan Riau. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Haq & Amin (2014), lebih menekankan pada peran perempuan dalam pengentasan kemiskinan, namun kurang membahas indikator spesifik yang menggambarkan dalam pasar tenaga kerja perempuan. Disisi lain, beberapa penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan Asri et al. (2023) dan Baas (2025), menyajikan analisis makro terkait pengaruh ketenagakerjaan terhadap kemiskinan di Indonesia dan Jerman. Namun, penelitian-penelitian tersebut tidak secara

spesifik menghubungkan perempuan bekerja, pengangguran terbuka, dan IPG pada perempuan terhadap kemiskinan, secara lebih mendalam.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji pengaruh jumlah perempuan bekerja, pengangguran perempuan, dan IPG terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini juga menyoroti peran tenaga kerja perempuan dalam upaya pengentasan kemiskinan serta mengisi keterbatasan kajian sebelumnya melalui pendekatan yang lebih komprehensif.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai ***“Analisis Pengaruh Angkatan Kerja Perempuan, dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang telah dikemukakan, penelitian mengenai pengaruh jumlah perempuan bekerja, jumlah Perempuan menganggur, dan IPG terhadap kemiskinan di provinsi Sumatera Utara, maka dapat dituliskan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jumlah perempuan bekerja terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana pengaruh jumlah pengangguran perempuan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara?
3. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Gender terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis:

1. Menganalisis pengaruh jumlah perempuan bekerja terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
2. Menganalisis pengaruh jumlah pengangguran perempuan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
3. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Gender terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi penting bagi studi selanjutnya di bidang ekonomi, ketenagakerjaan, dan kemiskinan, khususnya terkait peran pasar tenaga kerja perempuan. Temuan penelitian ini dapat memperkuat dasar pengembangan riset dan kebijakan yang mendukung pengentasan kemiskinan serta mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi berbagai pihak, antara lain bagi pemerintah daerah Sumatera Utara untuk meningkatkan kondisi pasar tenaga kerja perempuan dan mendukung pengurangan kemiskinan, bagi tenaga kerja perempuan sebagai wawasan mengenai pentingnya berpartisipasi dalam sektor pekerjaan yang lebih stabil dan berpendapatan tinggi guna meningkatkan kualitas hidup, bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan peran perempuan dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan serta mendorong pengurangan diskriminasi gender di pasar tenaga kerja dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dengan memberikan pemahaman tentang hubungan antara perempuan bekerja, pengangguran perempuan, IPG, dan kemiskinan, yang dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan efektif dan studi lanjutan di wilayah lain.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berbasis latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis akan membatasi variabel yang diuji sebagai faktor yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, yaitu jumlah angkatan kerja Perempuan yang terdiri dari jumlah Perempuan bekerja dan jumlah pengangguran perempuan, dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), Variabel-variabel ini dipilih untuk melihat peran partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Adapun lokasi penelitian mencakup 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, dengan data penelitian yang digunakan berupa data sekunder selama kurun waktu lima tahun, yaitu dari 2019 hingga 2023. Data diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara dan Publikasi BPS “Keadaan Angkatan Kerja di Sumatera Utara”.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab yang disusun secara sistematis beserta uraian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara umum permasalahan yang akan diteliti, yang terdiri dari enam bagian utama, yaitu latar belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini mengulas landasan teori, yang mencakup pengertian kemiskinan, teori-teori utama yang digunakan sebagai rujukan, hubungan antara variabel dependen dan independen, hipotesis, penelitian sebelumnya, serta kerangka teori yang mendasari penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai tipe penelitian, sumber serta jenis data, metode analisis, definisi operasional variabel, serta model dan teknik yang diterapkan dalam analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum mengenai subjek penelitian serta deskripsi data yang telah dikumpulkan, analisa data, dan pembahasan atau interpretasi hasil dengan membandingkan teori dan penelitian terdahulu, serta menjawab rumusan masalah.

BAB V: PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta memberikan saran-saran yang relevan untuk peneliti selanjutnya.